



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Provinsi Sumatera Barat	3.000.000.000
2	Provinsi Kepulauan Riau	3.000.000.000
3	Provinsi Jambi	19.650.584.000
4	Provinsi Bengkulu	2.000.000.000
5	Provinsi Lampung	2.000.000.000
6	Provinsi Jawa Barat	3.000.000.000
7	Provinsi Jawa Tengah	3.000.000.000
8	Provinsi DI Yogyakarta	20.056.006.000
9	Provinsi Jawa Timur	22.249.995.000
10	Provinsi Sulawesi Utara	19.563.185.000
11	Provinsi Sulawesi Tengah	19.218.244.000
12	Provinsi Sulawesi Selatan	19.041.986.000
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.000.000.000
14	Kab. Aceh Besar	3.000.000.000
15	Kota Banda Aceh	24.281.447.000
16	Kota Sabang	3.000.000.000
17	Kab. Nagan Raya	3.000.000.000
18	Kota Subulussalam	3.000.000.000
19	Kab. Humbang Hasundutan	3.000.000.000
20	Kab. Tanah Datar	3.000.000.000
21	Kota Solok	3.000.000.000
22	Kab. Siak	22.587.378.000
23	Kab. Bintan	3.000.000.000
24	Kab. Karimun	23.444.300.000
25	Kota Batam	23.762.476.000
26	Kab. Batanghari	3.000.000.000
27	Kab. Muaro Jambi	3.000.000.000
28	Kota Palembang	22.858.970.000
29	Kota Lubuk Linggau	2.000.000.000
30	Kab. Banyuasin	3.000.000.000

va



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
31	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.000.000.000
32	Kab. Bangka	3.000.000.000
33	Kab. Bangka Tengah	23.137.882.000
34	Kab. Kaur	2.000.000.000
35	Kab. Lebong	2.000.000.000
36	Kab. Bengkulu Tengah	2.000.000.000
37	Kab. Lampung Barat	3.000.000.000
38	Kab. Lampung Tengah	23.326.051.000
39	Kab. Way Kanan	3.000.000.000
40	Kota Bandar Lampung	26.273.764.000
41	Kota Metro	3.000.000.000
42	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000.000
43	Kota Depok	22.197.377.000
44	Kab. Serang	3.000.000.000
45	Kab. Tangerang	3.000.000.000
46	Kota Tangerang	3.000.000.000
47	Kota Serang	19.306.571.000
48	Kota Tangerang Selatan	25.270.927.000
49	Kab. Banyumas	3.000.000.000
50	Kab. Boyolali	3.000.000.000
51	Kab. Jepara	22.253.216.000
52	Kab. Karanganyar	18.935.183.000
53	Kab. Kebumen	21.867.375.000
54	Kab. Purworejo	3.000.000.000
55	Kab. Semarang	3.000.000.000
56	Kab. Temanggung	3.000.000.000
57	Kota Surakarta	24.840.490.000
58	Kab. Bantul	24.700.344.000
59	Kab. Sleman	25.878.507.000
60	Kota Yogyakarta	24.187.647.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
61	Kab. Bangkalan	22.112.413.000
62	Kab. Bondowoso	24.939.392.000
63	Kab. Gresik	21.136.997.000
64	Kab. Jember	3.000.000.000
65	Kab. Lamongan	20.407.073.000
66	Kab. Tulungagung	25.208.955.000
67	Kota Malang	27.655.721.000
68	Kota Mojokerto	23.161.017.000
69	Kota Probolinggo	21.943.361.000
70	Kota Surabaya	23.629.261.000
71	Kab. Sintang	3.000.000.000
72	Kota Pontianak	23.352.481.000
73	Kota Bitung	23.746.633.000
74	Kab. Gorontalo	3.000.000.000
75	Kab. Banggai	22.655.766.000
76	Kab. Donggala	25.156.543.000
77	Kab. Morowali	3.000.000.000
78	Kab. Poso	22.317.301.000
79	Kota Palu	27.588.057.000
80	Kab. Tojo Una Una	22.625.623.000
81	Kab. Sigi	3.000.000.000
82	Kab. Bulukumba	22.829.854.000
83	Kab. Enrekang	19.225.406.000
84	Kab. Gowa	3.000.000.000
85	Kab. Maros	21.883.191.000
86	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.191.245.000
87	Kab. Pinrang	26.687.187.000
88	Kab. Wajo	22.579.561.000
89	Kab. Luwu Timur	22.270.516.000
90	Kab. Mamuju	2.000.000.000

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam Rupiah)

NO	DAERAH	JUMLAH
91	Kab. Buton	21.301.307.000
92	Kab. Konawe	19.508.469.000
93	Kab. Kolaka	19.341.246.000
94	Kab. Bombana	20.575.030.000
95	Kab. Badung	23.311.379.000
96	Kab. Gianyar	19.943.276.000
97	Kota Denpasar	22.763.285.000
98	Kab. Lombok Tengah	22.809.994.000
99	Kab. Sumbawa	22.052.555.000
	Total Provinsi	138.780.000.000,00
	Total Kabupaten/ Kota	1.249.020.000.000,00
	Total Nasional	1.387.800.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.07/ 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA INSENTIF DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
..... menyatakan :

1. telah mencantumkan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan/atau akan mencantumkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014;
2. segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer; dan
3. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai Rp6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature